**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAK****ILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PRESPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

**ARTIKEL**

**Disusun Oleh :**

**Nama :** **Boyke Luthfiana Syahrir**

**NPM : 178040030**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Di bawah bimbingan:**

**Dr. H. Absar Kartabrata, S.H,.M.Hum**

**Gialdah Tapiansari Batubara, S.H,.M.H**

****

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2019**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG DITINAJU DARI PRESPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan yang tidak biasa pula. Maka dalam hal ini perlu terus dikaji mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.Pada sekitar bulan April 2011 Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera (Selanjutnya disebut dengan YHBS), mengajukan proposal permohonan bantuan belanja Hibah kepada Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Ketua YHBS. Sekitar bulan November 2011, karena tanggal dalam Proposal kadaluarsa dan adanya informasi yang diperoleh bahwa bantuan hibah dapat diajukan dalam jumlah yang lebih besar, maka YHBS kembali mengajukan proposal permohonan hibah dengan Nomor : 025/YHBS/11/2011, tanggal kosong (tanpa tanggal) bulan November 2011 dalam jumlah nominal yang lebih besar yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) yang ditandatangani oleh ketua YHBS. Proposal permohonan bantuan belanja hibah tersebut kemudian dimasukan oleh sekretaris YHBS melalui pimpinan Tata Usaha (TU), selain itu juga ada yang dititipkan kepada terdakwa Kadar Slamet bin Abdul Qodir, yang diketahuinya adalah Anggota Badan Anggaran DPRD kota Bandung. Dengan perjanjian jika proposal tersebut dikabulkan sebagai penerima bantuan hibah, maka terdakwa Kadar Slamet bin Abdul Qodir meminta bagian dari dana hibah yang diperoleh oleh YHBS tersebut.

Metode yang digunakan adalah deskriptip-analitis dengan pendekatan normatif. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder dan studi lapangan dengan data primer. Pengumpulan data ini diperoleh dengan melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan yang telah diperoleh dengan cara studi dokumen. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan yuridis-kualitatif.

Akibat Hukum Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Bandung berdasarkan Putusan 80/Pid.Sus/TPK/2014/PN., Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Drs. Kadar Slamet bin Abdul Qodir (seorang Anggota DPRD Kota Bandung) melanggar ketentuan Pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah Dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Kota Bandung Nomor : 80/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg sudah benar, karena apabila unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair tidak terbukti maka hakim berkewajiban untuk memeriksa dakwaan subsider. Namun dalam pertimbangan hukum hakim cenderung lebih mengedepankan asas legalitas formal. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi untuk mewujudkan Kepastian Hukum di lingkungan kerja DPRD Kota Bandung dapat dilihat berdsarkan faktor-faktor penegakan hukum diantaranya faktor undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Dari 5 (lima) faktor di atas menurut penulis faktor yang dinilai masih lemah dalam penengakan hukum tindak pidana korupsi khususnya korupsi dana hibah disebabkan oleh 2 faktor yaitu pertama Perundang – undangan dan penegak hukum itu sendiri.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Dana Hibah.**

**ABSTRACT**

*Corruption is an extraordinary crime that requires unusual handling. So in this case it is necessary to continue to study the law enforcement against corruption. P there sometime in April 2011 YayasanHarapanBangsa Sejahtera (Hereinafter referred to YHBS), filed a proposal for shopping assistance grant to the Government of Bandung Rp. 435,000,000 (four hundred thirty five million rupiah), which was signed by the Chair of YHBS. About a r November 2011, as the date of the proposal expire and the information obtained that the aid grant may be submitted in larger quantities, then YHBS back**submit a grant application proposal with Number: 025 / YHBS / 11/2011, an empty date (without date) November 2 011 in a larger nominal amount of Rp. 3,000,000,000 (three billion households) signed by the chairman of YHBS. The proposal for grant shopping assistance request was then submitted by the YHBS secretary through the administration of Administration (TU) , in addition there was also entrusted to the defendant Kadar Slamet bin Abdul Qodir, who he knew was a Member of the Budget Council of the City of Bandung. With the agreement if the proposal was granted as the recipient of the grant assistance, the defendant Kadar Slamet bin Abdul Qodir requested part of the grant funds obtained by the YHBS.*

*The method used is descriptive-analytical with a normative approach . The research phase uses literature studies with secondary data and field studies with primary data. This data collection is obtained by carrying out an inventory of materials that have been obtained by means of a document study. Furthermore, the data were analyzed using qualitative-juridical.*

*The Legal Consequences of Corruption Crimes committed by Bandung City DPRD Members based on Decision 80 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN. , Assembly H Akim stated that the defendant Drs. The level of Slamet bin Abdul Qodir (a member of the Bandung City DPRD) violates the provisions of Article 3 Jo. Article 18 of Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption, which has been amended and supplemented by Law No. 20 of 2001, Jo Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. Bandung City District Court Decision Number: 80 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg is correct, because if the elements of criminal acts in the primair indictment are not proven then the judge is obliged to examine the subsidiary charges. But in legal considerations, judges tend to emphasize the principle of formal legality . Corruption Law Enforcement Efforts to realize Legal Certainty in the working environment of the Bandung City DPRD can be seen based on law enforcement factors including factors of law, law enforcement, supporting facilities , facilities , and culture. From the 5 (five) factors above, according to the author, the factors considered to be still weak in the legal enforcement of corruption, especially corruption in grant funds, are caused by 2 factors, namely the first legislation and law enforcement itself.*

***Keyword: Law Enforcement, Corruption, Grant Funds***